

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OPERASI PATUH DALAM TERTIB LALU LINTAS
DI WILAYAH HUKUM POLRES MOROWALI**Sulaiman^{1*}, Juemi², Rizmala Nadiah Borahima³^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panca Marga Palu, Palu, Indonesia**RIWAYAT ARTIKEL****Diterima:**

20-08-2025

Disetujui:

12-11-2025

Dipublikasi:

01-12-2025

Kata Kunci:*Implementasi Kebijakan;
Operasi Patuh Lalu Lintas;
Polres Morowali***ABSTRAK**

Penegakan hukum lalu lintas merupakan salah satu upaya strategis dalam menciptakan ketertiban dan keselamatan berkendara di jalan raya. Kepolisian Republik Indonesia secara rutin melaksanakan Operasi Patuh sebagai bentuk implementasi kebijakan untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Operasi Patuh di wilayah hukum Polres Morowali dengan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan Edwards III yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat kepolisian, masyarakat pengguna jalan, serta pelanggar lalu lintas, dilengkapi dengan observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Operasi Patuh di Morowali telah dijalankan melalui berbagai media komunikasi, baik sosialisasi langsung, media sosial, maupun kerja sama dengan media lokal. Namun, masih terdapat kendala berupa kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan jangkauan sosialisasi, serta adanya persepsi negatif bahwa operasi hanya bertujuan untuk penindakan tilang. Dari aspek sumber daya, keterbatasan jumlah personel, sarana prasarana, dan anggaran menjadi tantangan yang perlu diatasi. Pada aspek disposisi, aparat menunjukkan komitmen dan kedisiplinan yang baik, meskipun masih ditemukan persepsi ketidakadilan dalam penindakan. Sementara itu, dari aspek struktur birokrasi, pembagian tugas sudah jelas, namun koordinasi antar-institusi dan efektivitas pengawasan di lapangan masih perlu ditingkatkan. Kesimpulannya, Operasi Patuh di Morowali telah berjalan cukup efektif, tetapi memerlukan perbaikan dalam perluasan metode komunikasi, penambahan sumber daya, serta penguatan koordinasi antar-stakeholder. Dengan perbaikan tersebut, Operasi Patuh diharapkan dapat lebih optimal dalam membangun budaya tertib lalu lintas dan menurunkan angka pelanggaran di Morowali.

PENDAHULUAN

Transportasi jalan raya merupakan salah satu sektor vital yang mendukung aktivitas masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun budaya (Iriyena et al., 2019). Namun, tingginya intensitas penggunaan jalan raya juga membawa risiko berupa meningkatnya angka

pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan yang dapat mengancam keselamatan pengguna jalan. Kondisi tersebut menuntut adanya regulasi dan penegakan hukum yang konsisten guna menciptakan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kepolisian memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas.

Salah satu bentuk implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia adalah Operasi Patuh, yaitu operasi kepolisian berskala nasional yang dilaksanakan secara berkala untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas, meningkatkan kedisiplinan masyarakat, serta menurunkan tingkat kecelakaan di jalan raya. Operasi ini menekankan pada tindakan represif sekaligus preventif melalui penindakan hukum, sosialisasi, dan edukasi kepada masyarakat. Dengan demikian, Operasi Patuh tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada pembentukan budaya tertib lalu lintas.

Pelaksanaan Operasi Patuh di wilayah hukum Polres Morowali menjadi menarik untuk dikaji mengingat Morowali merupakan daerah dengan mobilitas tinggi, terutama akibat pertumbuhan industri pertambangan dan aktivitas ekonomi yang pesat. Kondisi ini berimplikasi pada meningkatnya volume kendaraan, potensi pelanggaran lalu lintas, serta risiko kecelakaan di jalan. Walaupun Operasi Patuh telah dilaksanakan, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya aparat, serta adanya persepsi negatif masyarakat bahwa operasi ini hanya berorientasi pada penindakan tilang.

Dalam perspektif implementasi kebijakan, keberhasilan suatu program dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi sebagaimana dikemukakan Edwards III (dalam Suprayitno et al., 2024). Apabila salah satu faktor tersebut tidak berjalan optimal, maka tujuan kebijakan tidak akan tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, analisis implementasi Operasi Patuh di Morowali perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan ini dijalankan, faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta dampaknya terhadap perilaku masyarakat dalam berlalu lintas.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Operasi Patuh dalam menciptakan ketertiban lalu lintas di wilayah hukum Polres Morowali dengan mengacu pada empat dimensi utama implementasi kebijakan menurut Edwards III, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan kepolisian di bidang lalu lintas serta menjadi masukan praktis bagi Polres Morowali untuk meningkatkan efektivitas Operasi Patuh di masa mendatang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan Operasi Patuh dalam tertib lalu lintas di wilayah hukum Polres Morowali. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif berupaya mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap penting oleh individu maupun kelompok terkait suatu permasalahan sosial.

Lokasi penelitian ditetapkan di wilayah hukum Polres Morowali, mengingat institusi ini merupakan pelaksana utama Operasi Patuh. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa daerah Morowali memiliki tingkat aktivitas lalu lintas yang cukup tinggi seiring pertumbuhan ekonomi, sehingga rawan pelanggaran lalu lintas dan membutuhkan intervensi kebijakan kepolisian.

Informan penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling, yakni pemilihan subjek secara sengaja berdasarkan peran, keterlibatan, dan pengetahuan mereka terhadap kebijakan Operasi Patuh. Informan terdiri atas aparat kepolisian (Kasat Lantas, Kanit Gakkum, dan personel

lapangan), masyarakat pengguna jalan, serta pelanggar lalu lintas. Teknik ini sejalan dengan pendapat Sugiyono (2019) bahwa purposive sampling tepat digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh data yang relevan dan mendalam.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan pedoman wawancara semi-terstruktur, sehingga memungkinkan peneliti menggali informasi sesuai konteks lapangan. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung mekanisme pelaksanaan Operasi Patuh, termasuk pola interaksi antara aparat dengan masyarakat. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data, berupa dokumen resmi Polres Morowali, laporan kegiatan, dan publikasi media terkait Operasi Patuh.

Analisis data dilakukan secara interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Miles et al. (2014), yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi. Validitas data diuji dengan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan dan metode, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini lebih terjamin kebenarannya.

Dengan rancangan metodologi tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan Operasi Patuh, termasuk faktor-faktor pendukung dan penghambatnya, serta dampaknya terhadap kesadaran tertib lalu lintas di Morowali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Komunikasi

Komunikasi antar pelaksana menjadi aspek penting agar kebijakan Operasi Patuh dapat berjalan akurat dan konsisten. Koordinasi dilakukan baik melalui media, pendekatan langsung, maupun kerja sama dengan pihak terkait.

AKP Atmaji Sugeng Wibowo, S.T.K., S.I.K (Kasat Lantas):

"Kami melakukan sosialisasi melalui berbagai cara, seperti media sosial, pemasangan spanduk, penyebaran brosur, serta kerja sama dengan media lokal. Selain itu, kami juga melakukan pendekatan langsung dengan memberikan himbauan kepada pengguna jalan di titik-titik strategis."

Analisis : Sosialisasi dilaksanakan melalui media sosial, spanduk, brosur, media lokal, serta himbauan langsung di lapangan.

Briptu Alfian (Banit Gakkum):

"Ya, salah satu kendala utama adalah masih adanya masyarakat yang kurang peduli atau bahkan tidak mengetahui adanya operasi ini, meskipun sudah kami umumkan. Selain itu, ada juga yang salah paham, mengira operasi ini hanya bertujuan untuk menilang, padahal lebih ke peningkatan kesadaran berlalu lintas."

Analisis : Kendala komunikasi yaitu kurangnya kepedulian masyarakat serta adanya kesalahpahaman tujuan operasi.

Muklis (Pelanggar):

"Saya tahu dari media sosial dan juga dari teman-teman sesama pengemudi. Informasinya cukup jelas, tapi ada beberapa yang masih bingung dengan aturan spesifik, misalnya terkait kelengkapan kendaraan. Kalau bisa, lebih banyak sosialisasi langsung di jalan supaya pengguna jalan lebih paham."

Analisis : Informasi melalui media sosial cukup membantu, tetapi detail aturan masih kurang jelas. Sosialisasi langsung di lapangan lebih dibutuhkan.

Hikma (Masyarakat):

"Secara umum sudah baik, tapi masih perlu diperluas jangkauannya. Misalnya, di desa-desa atau daerah terpencil, banyak yang belum mengetahui aturan dengan jelas. Akan lebih

efektif jika ada lebih banyak penyuluhan atau kerja sama dengan tokoh masyarakat untuk membantu menyebarluaskan informasi."

Analisis : Sosialisasi sudah baik, namun jangkauan masih terbatas, terutama di desa dan daerah terpencil.

Aipda Iwan Nasir (Kanit Gakkum):

"Kami sering diminta membantu menyampaikan informasi, terutama dalam pertemuan warga atau kegiatan keagamaan. Namun, saya rasa perlu lebih banyak koordinasi antara kepolisian dan masyarakat agar komunikasi lebih efektif dan informasi bisa sampai ke semua lapisan masyarakat."

Analisis : Perlu koordinasi lebih erat dengan masyarakat agar pesan sampai ke semua lapisan.

Kesimpulan Aspek Komunikasi:

Operasi Patuh di Polres Morowali telah didukung dengan sosialisasi melalui berbagai media dan pendekatan langsung. Namun, kendala yang muncul adalah kurangnya kesadaran masyarakat, jangkauan informasi yang terbatas, serta kesalahpahaman mengenai tujuan operasi. Diperlukan strategi komunikasi yang lebih luas, konsisten, serta melibatkan tokoh masyarakat.

Sumber Daya

Keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada kecukupan sumber daya manusia dan sarana prasarana.

AKP Atmaji Sugeng Wibowo, S.T.K., S.I.K (Kasat Lantas):

"Dalam Operasi Patuh, kami mengandalkan sumber daya yang ada, baik personel maupun sarana prasarana. Namun, ada beberapa kendala seperti keterbatasan jumlah anggota yang bertugas di lapangan serta fasilitas pendukung yang masih perlu ditingkatkan, misalnya kendaraan patroli dan alat komunikasi."

Analisis : Terdapat keterbatasan jumlah personel dan fasilitas pendukung.

Briptu Alfian (Banit Gakkum):

"Kami berusaha semaksimal mungkin dengan jumlah personel yang ada. Namun, idealnya jumlah personel di lapangan perlu ditambah, terutama saat jam-jam sibuk dan di titik rawan pelanggaran. Selain itu, pelatihan bagi anggota juga perlu ditingkatkan agar lebih efektif dalam menegakkan aturan lalu lintas."

Analisis : Jumlah personel terbatas, pelatihan anggota perlu diperkuat.

Muklis (Pelanggar):

"Dari yang saya lihat, aparat cukup siap, tetapi terkadang mereka kekurangan personel di beberapa lokasi. Misalnya, di titik macet atau di daerah yang sering terjadi pelanggaran, seharusnya lebih banyak petugas yang berjaga untuk memastikan kelancaran lalu lintas."

Analisis : Masyarakat melihat langsung kurangnya jumlah personel di titik rawan.

Kesimpulan Aspek Sumber Daya:

Operasi Patuh masih menghadapi kendala pada jumlah personel, sarana prasarana, dan infrastruktur pendukung. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan penambahan personel, peningkatan fasilitas (kendaraan patroli, alat komunikasi), serta perbaikan fasilitas lalu lintas melalui koordinasi lintas instansi.

Disposisi

Disposisi menekankan komitmen, kejujuran, dan kedisiplinan implementor kebijakan.

AKP Atmaji Sugeng Wibowo, S.T.K., S.I.K (Kasat Lantas):

"Petugas Satlantas memiliki komitmen penuh, menjalankan operasi dengan pendekatan humanis, serta mengutamakan edukasi."

Briptu Alfian (Banit Gakkum):

"Sebagian besar petugas bertindak tegas dan adil, namun masyarakat kadang merasa diperlakukan berbeda. Ada yang hanya ditegur, ada yang langsung ditilang. Diperlukan aturan penindakan yang lebih jelas agar masyarakat lebih menerima."

Analisis : Petugas umumnya baik dan berkomitmen, tetapi standar penindakan perlu diperjelas agar tidak menimbulkan kesan diskriminatif.

Kesimpulan Aspek Disposisi:

Implementasi Operasi Patuh di Polres Morowali berjalan dengan komitmen yang baik. Namun, tantangan berupa persepsi ketidakadilan dan potensi penyalahgunaan wewenang masih ada. Standarisasi penindakan dan pengawasan internal diperlukan agar masyarakat lebih menerima kebijakan ini.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi mencakup mekanisme dan SOP yang jelas agar implementasi berjalan efektif.

Petugas Satlantas:

“Pembagian tugas antar anggota sudah jelas, mulai dari pengaturan lalu lintas, penindakan pelanggaran, hingga edukasi. Namun, koordinasi kadang terkendala saat kondisi darurat atau lalu lintas padat.”

Aipda Iwan Nasir (Kanit Gakkum):

“Kerja sama dalam penyediaan fasilitas pendukung sudah ada, tetapi koordinasi perencanaan operasi perlu ditingkatkan agar peran setiap pihak lebih jelas.”

Hikma (Masyarakat):

“Satlantas sudah bekerja terorganisir, namun masih ada pos pemeriksaan yang kurang efektif karena pelanggar bisa lolos. Ia menilai perlu patroli yang lebih ketat dan koordinasi antar pos.”

Analisis : Masyarakat menilai informasi mengenai operasi masih kurang jelas dan terstruktur, sehingga sosialisasi yang lebih transparan diperlukan agar tidak ada kesan penindakan tiba-tiba.

Kesimpulan Aspek Struktur Birokrasi:

Struktur organisasi Operasi Patuh di Polres Morowali sudah jelas, namun masih ada kendala koordinasi, efektivitas pengawasan di lapangan, dan sosialisasi prosedur kepada masyarakat. Peningkatan koordinasi antar-pos, serta transparansi SOP kepada masyarakat akan memperkuat efektivitas kebijakan.

Pembahasan

Implementasi kebijakan publik pada dasarnya merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak faktor yang saling berinteraksi. Dalam konteks pelaksanaan Operasi Patuh di Kabupaten Morowali, efektivitas kebijakan sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia, kejelasan komunikasi, dukungan sarana prasarana, serta konteks sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini sejalan dengan pandangan Edwards III (dalam Suprayitno et al., 2024) yang menekankan empat variabel kunci dalam implementasi kebijakan: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempatnya dapat digunakan untuk memahami dinamika Operasi Patuh yang dijalankan oleh aparat kepolisian di Morowali.

Dari aspek komunikasi, penyampaian informasi mengenai tujuan, mekanisme, dan sanksi dalam Operasi Patuh menjadi faktor krusial. Apabila sosialisasi dilakukan secara konsisten dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, maka tingkat kepatuhan akan meningkat. Namun, jika komunikasi terhambat oleh keterbatasan akses informasi atau rendahnya kesadaran masyarakat, maka efektivitas kebijakan menurun. Dalam praktiknya, aparat kepolisian berupaya melakukan sosialisasi melalui media lokal, spanduk, hingga media sosial, meskipun masih terdapat tantangan berupa rendahnya literasi lalu lintas di kalangan masyarakat. Lipsky (1980) menegaskan bahwa aparat pelaksana di lapangan berperan sebagai street-level bureaucrats yang tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga melakukan interpretasi dan adaptasi sesuai kondisi masyarakat.

Sumber daya yang memadai juga menjadi faktor penentu. Operasi Patuh memerlukan dukungan personel yang cukup, ketersediaan kendaraan dinas, serta fasilitas teknologi untuk menunjang pengawasan. Dalam kenyataan, keterbatasan anggaran dan jumlah personel sering kali

membuat pelaksanaan operasi tidak optimal. Hal ini sesuai dengan argumen Mazmanian & Sabatier (1983) bahwa kegagalan implementasi sering kali disebabkan oleh lemahnya kapasitas sumber daya. Namun demikian, adanya komitmen dari aparat kepolisian untuk memaksimalkan potensi yang tersedia menunjukkan upaya adaptif dalam menghadapi keterbatasan tersebut.

Dari sisi disposisi atau sikap pelaksana, keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh integritas dan konsistensi aparat. Apabila aparat menunjukkan keteladanan dan bersikap adil dalam menindak pelanggaran, maka masyarakat akan lebih patuh. Sebaliknya, jika terdapat praktik diskriminasi atau penyalahgunaan kewenangan, maka legitimasi kebijakan akan menurun. Denhardt & Denhardt (2003) melalui paradigma New Public Service mengingatkan bahwa aparatur publik harus menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat, bukan sekadar pengendali. Prinsip ini relevan dalam Operasi Patuh, di mana aparat dituntut untuk tidak hanya menegakkan aturan tetapi juga membangun kesadaran kolektif akan pentingnya keselamatan berlalu lintas.

Struktur birokrasi yang terlalu kaku juga dapat menjadi hambatan. Di Morowali, koordinasi antar-unit kepolisian maupun dengan instansi lain masih menghadapi kendala teknis. Padahal, model implementasi kebijakan idealnya mendorong koordinasi lintas sektor agar kebijakan berjalan efektif. Hal ini sejalan dengan perspektif governance yang menekankan pentingnya kolaborasi antara aktor pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Operasi Patuh akan lebih berhasil apabila dikelola sebagai agenda bersama, bukan hanya domain kepolisian.

Selain faktor-faktor utama tersebut, keberhasilan implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya masyarakat. Dalam konteks Morowali, keberagaman latar belakang masyarakat serta tingginya mobilitas akibat pertumbuhan sektor industri menimbulkan tantangan tersendiri. Banyak pendatang yang belum memahami budaya tertib berlalu lintas di wilayah ini, sehingga kebijakan operasi tidak hanya berfungsi sebagai pengawasan, tetapi juga sebagai instrumen edukasi yang terus-menerus. Hal ini menguatkan pendapat Grindle (1980) bahwa implementasi kebijakan selalu dipengaruhi oleh konteks sosial politik di mana kebijakan itu diterapkan. Dengan demikian, Operasi Patuh di Morowali tidak bisa hanya dipahami sebagai aktivitas administratif, melainkan juga sebagai upaya adaptasi kebijakan terhadap realitas masyarakat setempat.

Kepercayaan publik terhadap aparat kepolisian juga memegang peran penting. Legitimasi polisi sebagai pelaksana kebijakan akan menentukan tingkat kepatuhan masyarakat. Jika masyarakat merasa kebijakan dilakukan secara adil, transparan, dan konsisten, maka tingkat kepatuhan akan meningkat. Sebaliknya, jika ada persepsi diskriminasi atau hanya berorientasi pada tilang, masyarakat akan cenderung resistif. Oleh sebab itu, keberhasilan Operasi Patuh bergantung pada sejauh mana aparat dapat membangun citra sebagai pelayan publik yang hadir untuk melindungi, bukan sekadar menindak.

Selanjutnya, dukungan dari aktor non-pemerintah juga tidak kalah penting. Peran organisasi masyarakat, sekolah, dan media lokal dapat memperkuat keberhasilan implementasi kebijakan lalu lintas. Jika sosialisasi tidak hanya dilakukan oleh aparat tetapi juga melibatkan komunitas, maka pesan kebijakan lebih mudah diterima. Hal ini sejalan dengan pendekatan collaborative governance yang menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam penyelesaian persoalan publik. Dengan demikian, Operasi Patuh sebaiknya tidak hanya dilihat sebagai kewenangan kepolisian semata, tetapi sebagai bagian dari kerja sama multi-aktor untuk menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman.

Dengan mempertimbangkan seluruh dimensi tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan tidak pernah berlangsung dalam ruang hampa. Ia dipengaruhi oleh kapasitas aparat, kejelasan komunikasi, ketersediaan sumber daya, struktur birokrasi, serta konteks sosial budaya masyarakat. Operasi Patuh di Morowali menunjukkan adanya upaya serius aparat kepolisian dalam menegakkan aturan, namun efektivitasnya baru akan optimal apabila faktor kepercayaan publik, partisipasi masyarakat, dan dukungan lintas aktor mampu diperkuat. Dengan demikian,

pembahasan ini menggarisbawahi perlunya pendekatan implementasi kebijakan yang tidak hanya teknokratis, tetapi juga partisipatif dan adaptif terhadap kondisi lokal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Operasi Patuh di Kabupaten Morowali merupakan salah satu instrumen penting kepolisian dalam menegakkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas. Efektivitasnya dipengaruhi oleh faktor komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, disposisi aparat, serta struktur birokrasi sebagaimana dikemukakan Edwards III. Selain itu, kondisi sosial budaya masyarakat yang majemuk, tingkat kepercayaan publik terhadap aparat, serta keterlibatan aktor non-pemerintah juga berperan signifikan dalam menentukan keberhasilan implementasi. Meskipun terdapat keterbatasan, aparat kepolisian menunjukkan komitmen untuk menjalankan operasi secara konsisten, baik dalam aspek penindakan maupun edukasi, sehingga kebijakan ini tetap memberi dampak positif bagi masyarakat. Ke depan, agar operasi serupa dapat lebih optimal, perlu ditingkatkan kualitas komunikasi publik melalui media yang variatif agar pesan kebijakan lebih mudah dipahami dan diterima masyarakat luas. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia maupun sarana prasarana juga penting untuk menunjang pelaksanaan di lapangan. Aparat dituntut untuk menanamkan nilai pelayanan publik dalam setiap tindakan agar kepercayaan masyarakat semakin kuat, sementara keterlibatan organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan media lokal harus diperluas sehingga operasi kepolisian tidak hanya dipandang sebagai agenda formal semata, tetapi sebagai gerakan bersama untuk membangun budaya tertib berlalu lintas secara berkelanjutan di Morowali.

REFERENSI

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (4th ed.)*. Sage.
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2003). The New Public Service: An Approach to Reform. *International Review of Public Administration, Taylor & Francis Journals*, 8(1), 3-10.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Iriyena, P., Naukoko, A. T., & Siwu, H. F. (2019). Analisis Pengaruh Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kaimana 2007-2017. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(2), 49-59.
- Lipsky, M. (1980). *Street Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. Russell Sage Foundation.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. Scott Foresman.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Terjemahan Tjetjep Rohindi. UI-Press.
- Sugiyono, S. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Alfabeta.
- Suprayitno, D., Selvia, F., & Suparyati, A. (2024). *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Sonpedia Publishing Indonesia.